



**ESTIMASI DAMPAK PENGELUARAN PEMERINTAH DAN
KEMISKINAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
TAHUN 2007-2021**

***Estimation of the Impact of Government Expenditure and Poverty
on the Human Development Index 2007-2021***

Meilan Anjasari¹, La Ode Turi², Kartomo³ dan Sapriyadi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Sembilanbelas November Kolaka
e-mail: meilananjasari285@gmail.com

ABSTRAK

Indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Kolaka dapat dikatakan meningkat cukup baik, namun peningkatannya masih lambat dibandingkan Kota Kendari dan Kota Bau-bau di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal tersebut tidak konsisten terhadap pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan yang anggarannya naik terus menerus tiap tahunnya. Begitu pula, pada tingkat kemiskinan yang bertambah sehingga menjadikan Kabupaten Kolaka menjadi Kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kolaka tahun 2007-2021. Metode penelitian yang digunakan ialah analisis regresi linear berganda. Hasil analisis pengaruh secara parsial menunjukkan pengeluaran pemerintah pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, sementara kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Untuk dapat menyelesaikan masalah IPM maka pemerintah Kabupaten Kolaka diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan kinerja ekonomi melalui ekonomi kerakyatan agar dapat mereduksi tingkat kemiskinan.

Kata kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Pengeluaran Pemerintah, Pendidikan, Kesehatan, Kemiskinan.

ABSTRACT

The human development index (HDI) in Kolaka Regency can be said to have increased quite well. However, the increase is still slow compared to Kendari City and Bau-bau City in Southeast Sulawesi Province. This is inconsistent with government spending on education and health whose budget continues to increase every year. Likewise, the increasing poverty rate makes Kolaka Regency the Regency/city with the highest poverty rate in Southeast Sulawesi Province. This study aims to examine and analyze the effect of government spending on education, government spending on health, and poverty on the human development index in Kolaka Regency in 2007-2021. The research method used is multiple linear regression analysis. The results of the partial effect analysis show that government spending on the education and health sector has a significant effect on the human development index, while poverty has no significant effect on the human development index. To be able to solve the HDI problem, the government of Kolaka



Regency is expected to improve education and health services and improve economic performance through a populist economy in order to reduce poverty levels.

Keywords: *Human Development Index, Government Spending, Education, Health, Poverty.*

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia telah menjadi komponen penting untuk kemajuan di negara tersebut. Sehingga pemerintah Republik Indonesia berpendapat bahwa pembangunan yang berasal pada manusia lebih utama daripada yang lain. Apabila suatu negara atau daerah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, maka pelaksanaan pembangunan akan semakin mengalami kemajuan pada semua bidang. Untuk menggapai tujuan negara, pemerintah daerah melakukan program/kegiatan untuk membantu masyarakat di berbagai bidang pelayanan publik, seperti kesehatan, infrastruktur, pendidikan dan lain-lain, yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat (Ritonga, 2014). Pemerintah Kabupaten Kolaka berupaya melaksanakan pembangunan manusia diukur dengan melihat tingkat (IPM) bersama dengan menurunkan tingkat kemiskinan serta memprioritaskan pembangunan pada bidang pendidikan dan kesehatan melalui anggaran pengeluaran Pemerintah yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Perkembangan IPM Kabupaten Kolaka mengalami kenaikan dari 69,76 pada tahun 2007 menjadi 73,56 pada tahun 2021. Kenaikan IPM ini memperlihatkan tingkat status pembangunan manusia meningkat serta mencerminkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kolaka. Namun, dari data tersebut selama 15 tahun terakhir ini meningkat sebesar 3,8. Angka tersebut bergerak lambat di dibandingkan dengan Kota Kendari meningkat sebesar 9,6 dan Kota Bau-bau sebesar 4,56 dalam 15 tahun terakhir. Hal tersebut karena masih banyak indikator IPM yang perlu terus ditingkatkan pemerintah daerah. Lalu pada data pengeluaran pemerintah bidang bergerak naik terus-menerus dalam 15 tahun terakhir yakni pada tahun 2007 sebesar 116.109.000.000 hingga pada tahun 2021 sebesar 282.080.107.112. Sama dengan halnya pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan meningkat yakni sebesar 44.298.000.000 pada tahun 2007 dan sebesar 320.765.939.535 pada tahun 2021. Angka tersebut tidak konsisten terhadap IPM yang bergerak lambat. Selanjutnya tingkat kemiskinan yang dinyatakan dengan jumlah kemiskinan sebesar 75,60 pada tahun 2007 hingga 33,45 pada tahun 2021.

Berdasarkan data yang ada menunjukkan kenaikan yang cukup jauh pada pengeluaran pemerintah, namun tidak konsisten dengan perkembangan IPM yang melambat. Selain itu, pada tingkat kemiskinan yang dapat dilihat turun melambat sejalan dengan naik melambatnya juga IPM tetapi Kabupaten Kolaka menjadi Kabupaten kedua dengan tingkat kemiskinan yang tinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam penelitian Rahmat dan Bachtiar (2015) adanya pengeluaran pemerintah digunakan sebagai penunjang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dalam hal ini dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Pemerintah mengeluarkan anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan karena dapat diharapkan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dapat mengurangi kemiskinan. Sehingga menandakan adanya kebijakan pemerintah yang belum optimal.

Indikator IPM yang digunakan ialah ada tiga yaitu: (1) Indikator kesehatan, dapat dilihat menggunakan indikator angka harapan hidup (AHH). (2) Indikator Pendidikan, dapat dilihat menggunakan indikator angka rata-rata lama sekolah (RLS) dan angka harapan lama sekolah (HLS). (3) Indikator standar hidup layak, dengan melihat pengeluaran perkapita yang indikatornya diukur dengan indeks daya beli. Namun, ditemukan beberapa penelitian yang masih menunggunkan indikator angka melek huruf (AMH) diantaranya oleh (Mongan, 2019; Senewe et al., 2021). Indiator AMH sudah tidak relevan pada masa ssekarang dalam perhitungan IPM karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Hal tersebut karena AMH disebagian besar daerah telah meningkat pesat sehingga sudah tidak bisa lagi membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan metode baru yang lebih tepat dalam membedakan dengan baik, yakni memasukkan indikator rata-rata lama sekolah (RLS). Metode RLS sendiri dapat memberikan penjelasan yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi (BPS, 2022).

Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan serta kemiskinan terhadap IPM. Dapat digunakan sebagai pengetahuan dan informasi bagi peneliti selanjutnya dan masyarakat umum, serta dapat dijadikan sebagai rujukan yang bermanfaat untuk pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dalam pengambilan keputusan di masa mendatang.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data ialah dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis digunakan dalam penelitian ini ialah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan alat statistik berupa aplikasi *IBM SPSS Statistics 26*. Sebelumnya, untuk memberikan ketentuan bahwa persamaan regresi yang diperoleh memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten yakni menggunakan uji asumsi klasik. Lalu untuk menguji pengaruh variabel X terhadap Y digunakan uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi. Model persamaan analisis regresi linear berganda guna menjabarkan besarnya pengaruh dalam penelitian ini sebagai berikut:

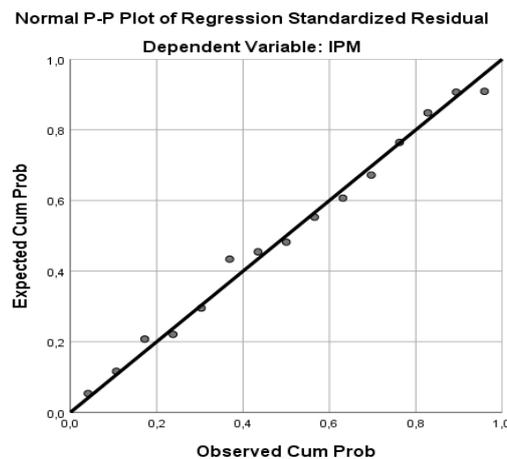
$$Y = \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln X_3 + e \quad (1)$$

Dimana: Y = Indeks Pembangunan Manusia; β_0 : Konstanta; $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi; Ln : Logaritma natural; X_1 : Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan; X_2 : Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan; X_3 : Jumlah Kemiskinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas ialah jika data atau titik menyebar sekitar garis diagonal maka pola berdistribusi normal, berarti memenuhi uji normalitas. Berikut gambar *Normal P-P Plot*, yaitu:



Gambar 1. Normal P-P Plot

Sumber: Hasil data sekunder *output SPSS 26 Tahun 2022*

Uji multikolinearitas untuk menguji apakah model regresi diperoleh korelasi antara variabel independen, Dengan melihat nilai pada *tolerance* atau VIF. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada *output* (SPSS 26), sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil uji multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1			
	PPB Pendidikan (X1)	,467	2,141
	PPB Kesehatan (X2)	,158	6,325
	Kemiskinan (X3)	,150	6,686

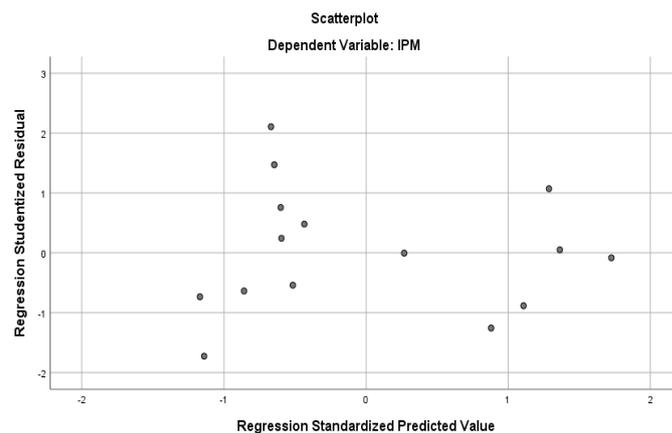
a. Dependent Variable: IPM

Sumber: Hasil data sekunder *output SPSS 26, Tahun 2022*

Output uji multikolinearitas pada Tabel 1, nilai X1 diperoleh nilai *tolerance* 0,467 > 0,1 dan nilai VIF 2,141 < 10. Lalu diperoleh hasil menyatakan variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidak mempunyai korelasi dengan variabel lain, berarti tidak terjadi multikolinearitas.

Output pada X2 diperoleh nilai *tolerance* 0,158 > 0,1 dan nilai VIF 6,325 < 10. Maka dapat dilihat bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan tidak mempunyai korelasi dengan variabel lain, berarti tidak terjadi multikolinearitas. *Output* pada X3 diperoleh nilai *tolerance* 0,150 > 0,1 dan nilai VIF 6,686 < 10. Maka dapat dinyatakan bahwa variabel kemiskinan tidak mempunyai korelasi dengan variabel lain, berarti tidak terjadi multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas bermaksud untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu titik ke titik yang lain. Dapat dilihat pada gambar scatterplotsnya, sebagai berikut:



Gambar 2. Scatterplot

Sumber: Hasil data sekunder *output SPSS 26 Tahun 2022*

Gambar 2 di atas menggambarkan tidak terjadi heteroskedastisitas karena tidak ada pola yang berbentuk dan titik menyebar sekitar garis diagonal. Melihat gambar *scatterplot* maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Lalu, uji autokorelasi untuk menguji apakah dalam model regresi antara residual pada periode dengan residual periode sebelumnya. Dalam uji autokorelasi digunakan pengujian Durbin Watson (DW) dengan kriteria jika tidak terjadi autokorelasi apabila nilai DW terletak antara $2 - d_u$ sampai dengan $2 + d_u$. Nilai d_u dicari dalam distribusi nilai tabel Durbin Watson berdasarkan k = Jumlah variabel bebas atau variabel independen dan melihat n = adalah banyaknya data per variabel. Hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat, sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil uji autokorelasi

Model Summary ^b	
Model	Durbin-Watson
1	1,662

a. Predictors: (Constant), Kemiskinan, PPB Pendidikan, PPB Kesehatan

b. Dependent Variable: IPM

Sumber: Hasil Data Sekunder *output SPSS 26 Tahun 2022*

Hasil uji autokorelasi berdasarkan Tabel 2 diperoleh nilai $du = 1,750$ dan $4-du = 2,249$. Maka diperoleh hasil nilai $du > DW$ dan $DW < 4-du$, sehingga berada pada titik keragu-raguan atau terdapat gejala autokorelasi yang lemah.

Regresi Linear Berganda

Uji t bermaksud untuk melihat persamaan model regresi yang terbentuk secara parsial variabel-variabel independennya (X_1 , X_2 , dan X_3) berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia yakni variabel dependen (Y). Berikut hasil *output SPSS 26* untuk melihat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel independen:

Tabel 3. Hasil regresi linear berganda

Coefficients ^a			ANOVA ^a		Model Summary ^b	
Model	Unstandardized Coefficients	Sig.	Model	Sig.	Model	Adjusted R Square
	B					
1			1		1	,870
(Constant)	28,847	,365	Regression	,000 ^b		
PP Pendidikan	-2,529	,015	Residual			
PP Kesehatan	3,693	,000	Total			
Kemiskinan	1,306	,201	a. Dependent Variable: IPM		a. Predictors: (Constant), Kemiskinan, PP Pendidikan, PP Kesehatan	
			b. Predictors: (Constant), Kemiskinan, PP Pendidikan, PP Kesehatan		b. Dependent Variable: IPM	

Sumber: Hasil Data Sekunder *output SPSS 26* Tahun 2022

Berdasarkan hasil olah data pada Tabel 3 pada kolom *Coefficients*, X_1 menunjukkan hasil *sig.* (0,015) < 0,05, maka terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Y . Sehingga adanya pengaruh signifikan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap IPM.

Output pada Tabel 3 pada kolom *Coefficients*, X_2 menunjukkan hasil *sig.* (0,000) < 0,05, maka adanya pengaruh yang signifikan terhadap Y . Sehingga adanya pengaruh signifikan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap IPM.

Output pada Tabel 3 pada kolom *Coefficients*, X_3 menunjukkan hasil *sig.* (0,201) > 0,05, maka terlihat pengaruh namun tidak signifikan terhadap Y . Sehingga adanya pengaruh tidak signifikan kemiskinan terhadap IPM.

Uji F bertujuan untuk mengetahui variabel independennya (X1, X2, dan X3) secara signifikan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Melihat *output* tabel 3 pada kolom *ANOVA*, didapatkan menunjukkan nilai *Sig.* (0,000) < 0,05, maka adanya pengaruh secara bersama-sama (simultan) pada variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y. Dengan demikian disimpulkan maka pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan kemiskinan secara bersama-sama berpengaruh terhadap IPM.

Koefisien Determinasi Bertujuan memperkirakan kekuatan model regresi menjelaskan seberapa besar variabel independen (X) memberikan kontribusi terhadap variabel dependen (Y). Diketahui nilai dari koefisien determinan pada tabel 3 pada kolom *Model Summary*, sebesar 0,870. Melihat angka koefisien determinasi 87,0%. Maka, menyatakan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan kemiskinan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia sebesar 87,0%. Lalu, sebagiannya sebesar 13% (100 – 87%) dipengaruhi dari variabel lain yang tidak dimasukkan penelitian ini. Misalnya tingkat pengangguran, pendapatan per kapita, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil olah data pada Tabel 3 pada kolom *Coefficients*, angka koefisien regresi pada tiap variabel di atas maka dituliskan ke dalam persamaan regresi linear berganda dengan melihat tabel *coefficients* pada *Unstandardized Coefficients* kolom B, yakni:

$$Y = 28,847 - 2,529 + 3,693 + 1,306 \quad (2)$$

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan maka dapat diketahui koefisien konstanta sebesar 28,847. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan tingkat kemiskinan bernilai 0, maka nilai variabel indeks pembangunan manusia sebesar 28,847.

Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (X1) bernilai negatif namun berpengaruh signifikan terhadap IPM (Y). Hasil pengolahan data diperoleh nilai regresi 2,529 yang artinya setiap kenaikan 1% anggaran pengeluaran pemerintah bidang pendidikan maka akan menurunkan nilai IPM sebesar 2,529%.

Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (X2) bernilai positif dan berpengaruh signifikan terhadap IPM (Y). Hasil pengolahan data diperoleh nilai regresi 3,693 yang artinya setiap kenaikan 1% anggaran pengeluaran pemerintah bidang kesehatan maka akan meningkatkan nilai IPM sebesar 3,693%.

Tingkat kemiskinan (X3) bernilai positif namun berpengaruh tidak signifikan terhadap IPM (Y). Hasil pengolahan data diperoleh nilai regresi 1,306 yang artinya setiap kenaikan 1% tingkat kemiskinan maka akan meningkatkan nilai IPM sebesar 1,306%.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap IPM

Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan bernilai negatif namun berpengaruh signifikan terhadap IPM. Melihat data menunjukkan bahwa anggaran pengeluaran pemerintah bidang pendidikan mengalami kenaikan yang terus menerus, namun tidak sebanding dengan IPM yang cenderung konsisten bergerak secara lambat. Sehingga secara statistik bernilai negatif menunjukkan bahwa terjadi keborosan anggaran pada pengeluaran pemerintah bidang pendidikan. Dalam hal ini dapat dilihat masih terdapat beberapa masalah yang sedang terjadi di Kabupaten Kolaka yang berkaitan dengan pendidikan yang termuat dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Kabupaten Kolaka. Pemerintah Kabupaten Kolaka, 2019), yaitu: (1) Belum meluasnya akses pendidikan wajib 12 tahun; (2) Kuantitas, kualitas dan sebaran guru belum maksimal; (3) Masih terbatas ketersediaan sarana penunjang PAUD/SD/SMP; (4) Belum tersedia bantuan berupa beasiswa pendidikan untuk masyarakat kurang mampu dan berprestasi; serta (5) Masih perlunya memahami paham kebangsaan dan keagamaan.

Melihat masalah tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa naiknya pengeluaran pemerintah bidang pendidikan selama 15 tahun terakhir berpengaruh terhadap IPM. Berpengaruh negatif karena masih terdapat masalah atau rencana pada bidang pendidikan belum dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Kolaka. Oleh karena itu, IPM cenderung bergerak secara lambat karena terjadi keborosan anggaran pada pengeluaran pemerintah bidang pendidikan.

Hal ini selaras terhadap penelitian yang dilaksanakan oleh Laode et al., (2020) bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Karena pada dasarnya semakin tinggi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan akan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Tidak optimalnya pengalokasian anggaran pendidikan sehingga adanya efek negatif terhadap IPM itu sendiri (Winarti, 2014)

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap IPM

Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan bernilai positif dan berpengaruh signifikan terhadap IPM tahun 2007-2021. Hal tersebut karena banyaknya pencapaian indikator peningkatan kesehatan antara lain, meliputi Capaian Pelaksanaan Peningkatan, meliputi: Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu (AKI), Prevalensi Wanita Kurang Gizi, Angka Kematian Anak Balita (AKABA), Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan, Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih, Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan Balita, Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan, dan Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan (Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Adanya capaian pelaksanaan peningkatan pada bidang kesehatan sehingga naiknya pengeluaran

pemerintah pada bidang kesehatan dapat juga menaikkan tingkat IPM di Kabupaten Kolaka selama 15 tahun terakhir.

Menurut Pake et al., (2018) menjelaskan bahwa Pengeluaran pemerintah di sektor Kesehatan terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM karena tiap bertemu perubahan pada pengeluaran pemerintah di sektor Pendidikan akan berdampak pada IPM serta didukung oleh optimalnya kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran kesehatan. Sejalan dengan penelitian Arifin (2015) menyatakan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap IPM berpengaruh positif dan signifikan, yang berarti setiap kali pemerintah menaikkan anggaran pada bidang kesehatan maka diikuti juga meningkatnya IPM.

Pengaruh Kemiskinan Terhadap IPM

Tingkat kemiskinan bernilai positif namun berpengaruh tidak signifikan. Termuat dalam Katalog Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa Pandemi COVID-19 yang mulai terjadi di Indonesia sejak awal 2020 hingga sekarang telah membawa dampak sangat besar di berbagai aspek kehidupan, terutama di bidang sosial dan ekonomi. Virus corona yang mudah menyebar menyebabkan pemangku kebijakan sering melakukan pembatasan. Pembatasan ini tentunya berakibat pada berkurangnya pergerakan masyarakat ke berbagai tempat, seperti sekolah, pusat perbelanjaan, dan tempat ibadah.

Namun, masyarakat tidak bisa terus menerus dibatasi tanpa adanya banyak interaksi dengan sesama manusia. Akhirnya, pemerintah memutar otak dengan melakukan pembaharuan di banyak bidang agar interaksi dan kegiatan tidak terhambat. Salah satu yang paling dominan adalah memaksimalkan penggunaan internet pada masyarakat. Hal ini ditandai dengan adanya proses belajar mengajar secara daring (*online*) yang telah diputuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, banyak pedagang yang menjual produknya melalui *marketplace* daring yang harus diakses dengan internet karena pembatasan berjualan di pasar.

Menunjukkan adanya kenaikan persentase rumah tangga yang mengakses internet pada tahun 2021. Rumah tangga yang anggotanya mengakses internet meningkat sebanyak 8.47 persen pada tahun 2021 dibanding tahun 2020. Peningkatan tersebut bernilai lebih tinggi dari peningkatan pada tahun 2020 dibanding tahun 2019, yaitu sebesar 7.06 persen. Peningkatan sebesar itu disinyalir merupakan efek dari pandemi yang memaksa masyarakat untuk mengakses internet. Peningkatan penggunaan internet juga terjadi pada kelompok masyarakat dengan pengeluaran 40% tengah dan 40% terbawah. pengeluaran 40% tengah, yaitu sebesar 10.97% dan pengeluaran 40% terbawah sebesar 7.42%. Maka, selama pandemi ini banyak masyarakat dengan pendapatan yang relatif rendah yang beralih menggunakan internet.

Selain itu, menurut Wahyudi dan Rejekingsih (2013) merujuk pada teori lingkaran setan kemiskinan yang dikemukakan Nurse yang dimana ketertinggalan dalam kesejahteraan harus diatasi agar mata rantai lingkaran setan kemiskinan

bisa terputus. Namun dalam mengatasi hal tersebut dibutuhkannya pendidikan yang baik guna masyarakat mendapatkan ilmu pengetahuan. Semakin tinggi pendidikan tiap masyarakat maka akan meningkatkan produktivitas, Meningkatnya produktivitas dapat meningkatkan pendapatan dimasyarakat tersebut. Dengan hal tersebut kesejahteraan meningkat, sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Kabupaten Kolaka sendiri masih memiliki beberapa masalah dalam kebijakan program pada bidang pendidikan.

KESIMPULAN / CONCLUTIONS

Hasil penelitian menguraikan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Pada pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Lalu pada tingkat kemiskinan berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap IPM. Untuk dapat meningkatkan IPM maka anggaran pada pengeluaran pemerintah lebih dioptimalkan karena apabila alokasi anggaran telah optimal dalam hal ini dapat menurunkan tingkat kemiskinan dimasyarakat.

Solusi yang tepat dalam meningkatkan IPM yang telah diuraikan maka dibutuhkan program/kebijakan pembangunan pemerintahan daerah, yakni dengan meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dan dibutuhkannya program meningkatkan kinerja ekonomi melalui ekonomi kerakyatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas ekonomi rakyat guna menurunkan angka kemiskinan dimasyarakat Kabupaten Kolaka.

DAFTAR PUSTAKA

- (1) Arifin, M. Y. 2015. *Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia Jawa Timur 2006-2013.*
- (2) Indonesia. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Indonesia. (2022). Data Keuangan Daerah. <https://djpk.kemenkeu.go.id/>
- (3) Kabupaten Kolaka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka. (2022). Publikasi: Kabupaten kolaka dalam angka 2012. <https://kolakakab.bps.go.id/>
- (4) Kabupaten Kolaka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka. (2022). Publikasi: Kabupaten kolaka dalam angka 2017. <https://kolakakab.bps.go.id/>
- (5) Kabupaten Kolaka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka. (2022). Publikasi: Kabupaten kolaka dalam angka 2022. <https://kolakakab.bps.go.id/>

- (6) Kabupaten Kolaka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka. (2022). Indeks Pembangunan Manusia 2007-2021.
<https://kolakakab.bps.go.id/>
- (7) Kabupaten Kolaka. Badan Pusat Statistik. 2021. Kemiskinan 2004-2021. Sulawesi Tenggara.
<https://kolakakab.bps.go.id/>
- (8) Kabupaten Kolaka. Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka. (2019). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
[http://portal.kolakakab.go.id/download/file/RPJMD_KAB_KOLAKA_2019 - 2024_compressed.pdf](http://portal.kolakakab.go.id/download/file/RPJMD_KAB_KOLAKA_2019_-_2024_compressed.pdf)
- (9) Laode, M., Engka, D. S., & Sumual, J. I. 2020. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan Dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Utara (2015-2018)*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(02).
- (10) Mongan, J. J. S. 2019. Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 4(2), 163-176.
- (11) Pake, S. D. S., Kawung, G. M., & Luntungan, A. Y. 2018. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Halmahera Utara*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4).
- (12) Rahmat, D., & Bachtiar, N. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Sumatera Barat Oleh. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- (13) Ritonga, I. T. (2014). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- (14) Senewe, J., Rotinsulu, D. C., & Lapian, A. L. 2021. *Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Minahasa Selatan*. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(3).
- (15) Usmaliadanti, C., & Handayani, H. R. 2011. *Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sekor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- (16) V. Wiratna, Sujarweni. 2014. *SPSS untuk penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru press.
- (17) Wahyudi, D., & Rejekingsih, T. W. (2013). *Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah*. *Diponegoro Journal of Economics*, 2(1), 83-97.

- (18) Winarti, A., & Purwanti, E. Y. (2014). *Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kemiskinan, dan PDB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 1992-2012* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).